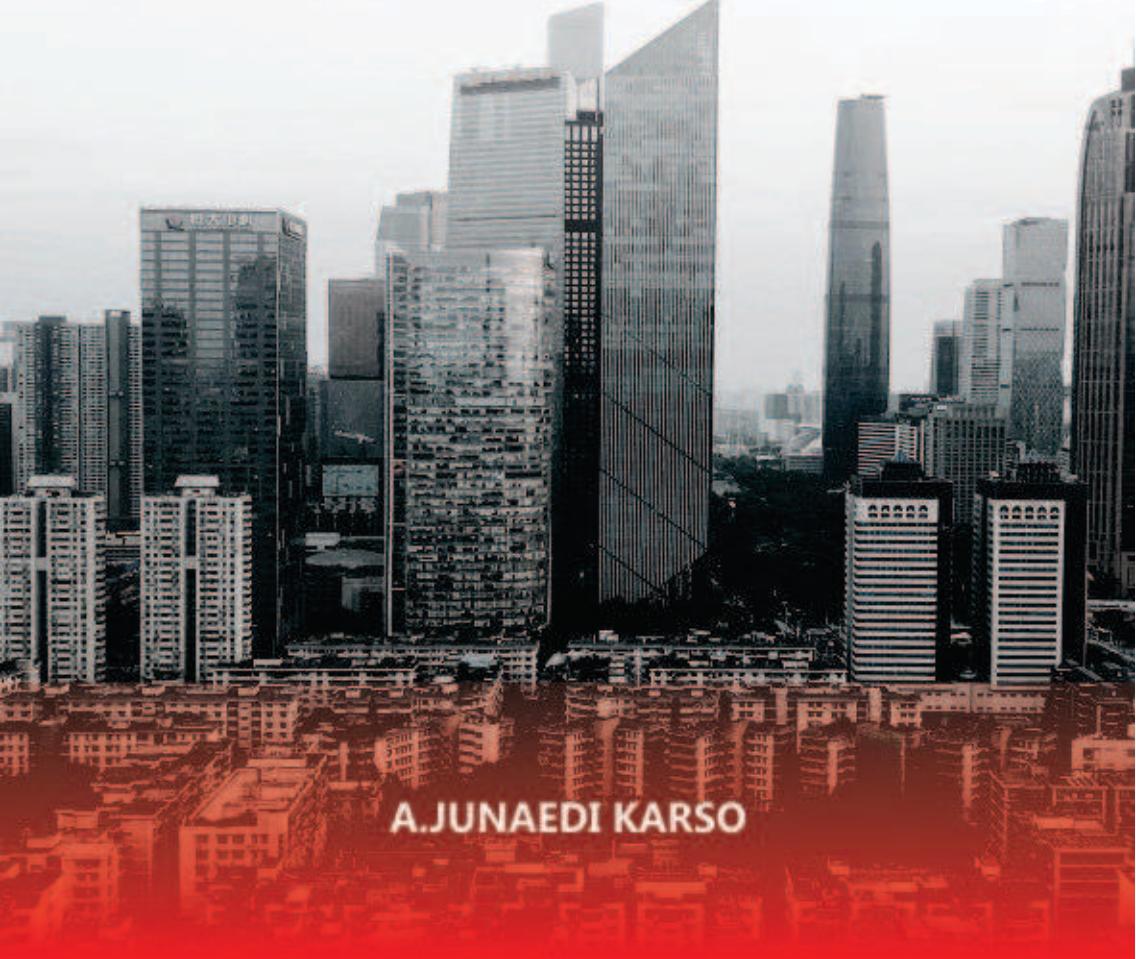




*Buku Ajar*

# **PEMERINTAH NASIONAL**



A.JUNAEDI KARSO

# Buku Ajar

# PEMERINTAH NASIONAL



**Junaedi (A. Junaedi Karso)** was born in Indramayu, on September 20, 1975. Apart from writing, he is also a Lecturer at the University of Muhammadiyah Makassar. He has been published in national and international journals, so scopus, and many books. Meanwhile, the education and training Training of Trainer (TOT) at BNSP in 2020, Implementation of Construction Work Contracts at BNSP in 2020, Preparation of Goods/Services Procurement Contracts at BNSP in 2020, International Training of Trainers (TOT) at IPB-KAN in 2021, BNSP Training of Trainers (TOT) at LPKN-Pelatinas in 2021, Management of BNSP Training Institutions at LPKN -Platinas in 2021, BNSP Distance Training Methodology at LPKN-Pelatinas in 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) at Quantum HRM International\_KAN in 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) at Quantum HRM International\_KAN in 2021,



eureka  
media akara  
Anggota IKA  
No. 225 UTE (2021)

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



**BUKU AJAR  
PEMERINTAH NASIONAL**

**A. Junaedi Karso**



**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

## **BUKU AJAR PEMERINTAH NASIONAL**

**Penulis** : A. Junaedi Karso

**Desain Sampul:** Eri Setiawan

**Tata Letak** : Salsabela Meiliana Wati

**ISBN** : 978-623-120-357-1

**No. HKI** : EC00202419339

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr, Wb.  
Bismillahirohmanirohim**

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang "**BUKU AJAR PEMERINTAH NASIONAL**".

Kami mohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan, salah nama atau salah menorehkan sumber-sumber terkait buku ini. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri, Melainkan yang kami kutip dari berbagai sumber baik dari buku Ajar, buku, jurnal, desrtasi, tesis, skripsi, website, google, media masa serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga "Allah SWT" membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

**Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib**

**Wassalamu'alaikum Wr WB.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB 1 PERTEMUAN PERTAMA PEMERINTAHAN.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Pemerintahan .....	1
B. Fungsi Pemerintahan .....	10
<b>BAB 2 PERTEMUAN KEDUA PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA.....</b>	<b>19</b>
A. Pembagian Kekuasaan.....	19
B. Asas Pemerintahan.....	22
<b>BAB 3 PERTEMUAN KETIGA PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA.....</b>	<b>61</b>
A. Pengertian Sistem Pemerintahan .....	61
B. Pembagian Sistem Pemerintahan.....	62
<b>BAB 4 PERTEMUAN KE EMPAT SISTEM PEMERINTAHAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA.....</b>	<b>69</b>
A. Sistem Pemerintahan Dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan .....	69
B. Sistem Pemerintahan dalam KRIS .....	74
C. Sistem Pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 .....	78
D. Sistem Pemerintahan dalam UUD 1945 setelah Perubahan .....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
<b>BAB 5 PERTEMUAN KE LIMA DASAR-DASAR SISTEM PEMERINTAHAN.....</b>	<b>85</b>
A. Pendahuluan.....	85
B. Makna Konsep dan Teori.....	87
C. Sejarah Pemerintahan.....	91
<b>BAB 6 PERTEMUAN KE ENAM KONSEP SISTEM DAN PEMERINTAHAN.....</b>	<b>95</b>
A. Pendahuluan.....	95
B. Konsep Dasar Sistem.....	96

<b>BAB 7 PERTEMUAN KE TUJUH KONSEP DASAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN .....</b>	<b>112</b>
A. Definisi Pemerintahan .....	112
<b>BAB 8 PERTEMUAN KE DELAPAN PEMERINTAHAN SEBAGAI SISTEM.....</b>	<b>118</b>
A. Pendahuluan .....	118
B. Pengaruh Sistem Pemerintahan Satu Negara Terhadap Negara-Negara Lain.....	121
C. Komponen Sistem Pemerintahan RI .....	125
D. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis .....	129
E. Kondisi Sistem Pemerintahan.....	132
DAFTAR PUSTAKA .....	135
<b>BAB 9 PERTEMUAN KE SEMBILAN ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI SUMBER DAN SUBSTANSI HUKUM TATA NEGARA .....</b>	<b>136</b>
A. Pendahuluan .....	136
B. Kesimpulan.....	154
DAFTAR PUSTAKA .....	156
<b>BAB 10 PERTEMUAN KESEPULUH SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 .....</b>	<b>160</b>
A. Pendahuluan .....	160
B. Konsepsi Dasar Sistem Pemerintahan.....	166
C. Praktek Sistem Pemerintahan berdasarkan Konstitusi.....	174
D. Kesimpulan.....	181
DAFTAR PUSTAKA .....	182
<b>BAB 11 PERTEMUAN KESEBELAS ILMU PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PEMERINTAH.....</b>	<b>186</b>
A. Ilmu Pemerintah .....	186
B. Kewenangan Pemerintah .....	193
C. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	195
<b>BAB 12 PERTEMUAN KE DUABELAS KOMPARASI PENERAPAN MODEL SISTEM PEMERINTAHAN ...</b>	<b>200</b>
A. Sistem Pemerintahan Indonesia .....	200
B. Manajemen Pemerintahan .....	203

DAFTAR PUSTAKA.....	216
TENTANG PENULIS.....	225

# BAB

# PERTEMUAN

# PERTAMA

# PEMERINTAHAN

1

## A. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.

Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang terlibat,
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah,
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafie, 2011: 61).

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political*);

# BAB

# 2

## PERTEMUAN KEDUA PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

### A. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia penuh dengan dinamika. Secara teoritis pada dasarnya masing-masing pembagian tugas lembaga negara dapat dirasakan seimbang sesuai dengan teori Trias Politika atau dalam kamus politik disebut *Check and Balance of Power*. Namun dalam prakteknya bentuk keseimbangan sering pula terjadi pergeseran, artinya suatu ketika akan terjadi "legislatif lebih kuat (*legislative heavy*) atau terkadang eksekutif lebih kuat (*executive heavy*), tergantung rezim yang memegang kekuasaan memiliki kemampuan memainkan peranannya, apakah di posisi eksekutif atau legislatif yang lebih kuat.

Jika melihat sejarah ketatanegaraan di Indonesia, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1965 atau disebut era Orde Lama, sistem pemerintahan parlementer (tahun 1945 s/d 1959) maka "legislatif posisinya lebih kuat, karena kepala pemerintahan (Perdana Menteri) diangkat oleh Parlemen, sehingga masa itu "politik" menjadi "panglima". Pada masa itu penyelenggaraan pemerintahan tidak stabil dan dengan sistem parlementer kabinet pemerintahan sering jatuh bangun, bahkan kabinet yang berumur paling pendek yaitu 3 bulan dan yang paling lama hanya satu tahun lebih.

# BAB

# 3

## PERTEMUAN KETIGA PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

### A. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan<sup>1</sup>, Secara umum, sering terjadi pencampuran dalam menggunakan istilah “bentuk pemerintahan” dan “sistem pemerintahan”. Padahal dalam ilmu negara, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan mendasar. Menurut Hans Kelsen, dalam teori politik klasik, bentuk pemerintahan diklasifikasikan menjadi monarki dan republik (*Kelsen, 1971: 256*). Ditambahkan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, paham L. Duguit dalam buku *“Traite’ de Droit Constitutionel”* (1923) lebih lazim dipakai untuk membedakan kedua bentuk tersebut (*Ibrahim, 1988: 166*). Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka disebut dengan monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tertentu maka bentuk negaranya disebut republik (*ibid*).

Sementara itu, dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud, sistem

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Sistem Pemerintah Negara, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2016, h.8-14.

# BAB

# 4

## PERTEMUAN KE EMPAT SISTEM PEMERINTAHAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA

### A. Sistem Pemerintahan Dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan

Selama penyusunan UUD 1945<sup>2</sup>, para pendiri negara menggagas Indonesia dengan model pemerintahan sendiri. Gagasan model “sistem pemerintahan sendiri” sebagaimana yang diinginkan perumus UUD 1945 menimbulkan perdebatan di antara para pemikir dan peneliti ketatanegaraan Indonesia. Dari perdebatan yang ada, “sistem pemerintahan sendiri” yang diinginkan oleh perumus UUD 1945 memunculkan berbagai variasi di sekitar sistem presidensial. Meskipun secara terbatas terdapat anasir sistem parlementer, tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa rancangan undang-undang dasar yang dihasilkan BPUPK dapat dimasukkan dalam variasi sistem pemerintahan parlementer.

Bagir Manan (1995: 78) dalam “Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara” mengatakan, terdapat dua pendapat yang lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia di bawah UUD 1945, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Ditambahkan Manan, mereka yang

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Sistem Pemerintah Negara, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2016, h.16-26.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: FH UI, 1990.
- A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: FH UI, 2009.
- A.V. Dicey. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 1897.
- Arend Lijphart. *Parliamentary Government and Presidential Government*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Arend Lijphart. *Pattern of Democracy*. Yale: Yale University Press, 1999.
- Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- C.F. Strong. *Modern Political Constitution*. New York: Sidgwick & Jackson, 1972.
- Giovanni Sartori. *Comparative Constitutional Engineering*. New York: New York University Press, 1997.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Maxwell, 1971.
- Jimly Asshiddiqie, S.H.. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2007.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FH UI, 1988.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam*

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Sistem Pemerintah Negara, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2016

*Sistem Presidensial Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim. *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945.* Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.

Sri Sumantri. *Ketatanegaraan Dalam Kehidupan Politik Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Sri Sumantri. Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN. Bandung: Transito, 1976.

Wijono Prodjodikoro. *Azaz-azaz Hukum Tata Negara di Indonesia.* Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

# BAB

# 5

## PERTEMUAN KE LIMA

## DASAR-DASAR SISTEM

## PEMERINTAHAN

### A. Pendahuluan

Materi pokok yang disajikan dalam modul ini adalah konsep dasar dan teori sistem pemerintahan<sup>3</sup> dengan tujuan membekali mahasiswa untuk memperoleh pemahaman tentang konsep dasar dan teori sistem pemerintahan. Manfaat memahami materi yang disajikan dalam modul ini, mahasiswa diharapkan memiliki konsep dasar dan teori sebagai bekal dalam menganalisis atau sebagai alat analisis (tools of analysis) dalam mempelajari berbagai hal penting yang relevan dengan mata kuliah sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa harus terlebih dahulu memahami dan mengerti tentang konsep dan teori sistem pemerintahan. Materi yang dipaparkan merupakan perpaduan antara teori dan praktik sehingga setiap fenomena yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan selalu dianalisis berdasarkan bingkai teoritik tertentu sehingga pemahaman dan wawasan akan lebih komprehensif. Modul ini dibagi dalam dua kegiatan belajar. Secara lengkap materi yang disajikan dalam modul ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1. Konsep dan Teori Sistem Pemerintahan:

---

<sup>3</sup> Dr. Edi Santosa, S.U., Dr. Siti Aisyah, M.Si., Modul 1, Sistem Pemerintah Indonesia, IPEM4320/MODUL 1, h.1.1-1.18.

# BAB

# 6

## PERTEMUAN KE ENAM

## KONSEP SISTEM DAN

## PEMERINTAHAN

### A. Pendahuluan

Berikut akan dibahas mengenai konsep sistem dan pemerintahan<sup>4</sup>. Paradigma ilmu pengetahuan modern yang berakar pada tradisi positivisme selalu memahami realitas sebagai sesuatu yang tidak tunggal dan berdiri sendiri. Sesuatu objek dipandang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang kemudian membentuk suatu sistem yang kompleks. Kompleksitas sistem yang terbangun terdiri dari kumpulan beberapa sub-sub sistem.

Pemerintahan secara konseptual dapat dijumpai dalam beragam pengertian bahasa asing. Pengertian-pengertian yang dikemukakan memberikan indikasi yang luas, tentang apa yang mereka sebut sebagai pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah secara umum adalah seluruh penyelenggara negara baik pegawai negeri, pejabat yang karena jabatannya, maupun kelembagaan, seperti jawatan, dinas, badan-badan usaha milik negara dan daerah, di mana seluruhnya memiliki kewenangan melaksanakan pemerintahan dalam suatu sistem tertentu. Mereka yang berfungsi menjalankan pemerintahan adalah mereka yang tidak saja berada di pemerintahan negara, tetapi juga yang tersebar di seluruh institusi pemerintahan daerah.

---

<sup>4</sup> Dr. Edi Santosa, S.U., Dr. Siti Aisyah, M.Si., Modul 1, Sistem Pemerintah Indonesia, IPEM4320/MODUL 1, h.1.14-1.30.

# BAB 7

## PERTEMUAN KE TUJUH KONSEP DASAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

### A. Definisi Pemerintahan

Dewasa ini kita seringkali melihat, membaca dan mendengar kata pemerintahan, tetapi tahukah kita arti dari makna pemerintahan sebenarnya. Pemerintahan menurut etimologi (kebahasaan) berasal dari kata "perintah", yang kita ketahui berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: republik, monarki/kerajaan, persemakmuran (commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut terdapat beragam cabang, seperti: monarki konstitusional, demokrasi, dan monarki absolut/mutlak.

Pengertian pemerintah dan pemerintahan secara umum dan menurut para ahli sebagai berikut. Pemerintahan menurut etimologi (kebahasaan) berasal dari kata "perintah", yang kita ketahui berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang

# BAB

# 8

## PERTEMUAN KE DELAPAN PEMERINTAHAN SEBAGAI SISTEM

### A. Pendahuluan

Konsep sistem merupakan idiom yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmu-ilmu lingkungan (ekologi). Sistem digambarkan sebagai suatu tatanan yang terbentuk dari hasil interaksi antara komponen lingkungan, biotik dan abiotik, dengan komponen organis, dari makhluk monosel hingga multisel seperti manusia.

Dalam Ilmu Pemerintahan, konsep sistem<sup>5</sup> berguna untuk membahas pola-pola interaksi di antara seluruh komponen yang terbentuk dari hubungan-hubungan pemerintahan. Pembahasan sistem pemerintahan menggambarkan interaksi fungsional antarkomponen berdasarkan kondisi dan nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan pemerintahan tersebut.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

---

<sup>5</sup> Dr. Edi Santosa, S.U., Dr. Siti Aisyah, M.Si., Modul 1, Sistem Pemerintah Indonesia, IPREM4320/MODUL 1, h.1.36-1.49.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirin, Tatang S. 2001. Pokok-pokok Teori Sistem. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam.1993. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Creswell, John W. 1993. Research Design: Qualitative & Quantitative Approach, hlm. 120. London: Sage.
- Musaneff. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Ndraha, Tadziluhu. 2003. Kybernetology I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihah, Ratnia dan Djopari J.R.G. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Surbakti, Ramlan. 1990. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Syafii, Inu Kencana. 1994. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.
- 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.

### **Sumber Internet:**

"Pengertian Konsep", (<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2035426-pengertian-konsep/#ixzz1J8Ld6mh5>).  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Teori>.

# BAB

# 9

## PERTEMUAN KE SEMBILAN ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI SUMBER DAN SUBSTANSI HUKUM TATA NEGARA

### A. Pendahuluan

Ilmu pemerintahan dan hukum tata negara merupakan dua ilmu yang mempunyai *ontology*, *epistemology* dan *axiology* masing-masing. Namun keduanya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri pada tataran pelaksanaannya. Jadi pada tataran pragmatis, ilmu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara dan hukum tata negara pun tidak dapat berjalan sendiri tanpa ilmu pemerintahan. Hanya pada sisi *ontology*, *epistemology* maupun *axiology*-nya kedua ilmu itu dapat dibedakan secara konkret tapi pada tataran implementasi, keduanya bersatu padu<sup>6</sup>.

#### 1. Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Itulah ketentuan yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDD Negara RI Tahun 1945). Secara klasik, kekuasaan pemerintahan dimaknai sebagai kekuasaan untuk melaksanakan keputusan atau kebijakan (*rule application function*) yang telah diputuskan oleh rakyat secara langsung

---

<sup>6</sup> Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, Ilmu Pemerintahan Sebagai Sumber dan Substansi Hukum Tata Negara, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020, ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169, h. 25-38

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Almond, Gabriel dan S. Coleman, James (Ed.), 1960, *The Politics of Developing Areas*. New Jersey: Princeton University Press.
- Blondel, Jean, 2015, *The Presidential Republic*, Palgrave Macmillan, New York. Budiardjo, Miriam, Cheibub, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: P.T.Gramedia Pustaka Utama.
- Cerar, Miro, "The Relationship Between Law and Politics", *Annual Survey of International & Comparative Law*, Vol.15, Iss:1, (2009).
- Jose Linz, Juan, "The Perils of Presidentialism", *Journal of Democracy*, Vol.1, No.1, Winter 1990.
- Mertokusumo,Sudikno, 1995, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty.
- Pasek Diantha, I Made, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Modern*. Bandung: C.V. Abardin.
- Polyanda, Petrus, "Menelurusi Duduknya Ilmu Pemerintahan", *Jurnal Politikologi*, Vol.3, No.1 (Oktober 2016).
- R. Ball, Allan, 1988, *Modern Politics and Government*, Fourth edition. London: Macmillan Education Ltd.
- Sartori,Giovanni, 1994, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*. London: MacMillan Press Ltd.
- Wheare, K.C., 1962, *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun II (Tahun 1946) No.7.) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11 sampai dengan Nomor 14)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656).

## **Jurnal**

Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, Ilmu Pemerintahan Sebagai Sumber dan Substansi Hukum Tata Negara, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020, ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169, h. 25-38

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyaratatan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## *Online Resources*

Article II Section 1 dan the 12<sup>th</sup> Amendment of the *Constitution of the United States of America*, [https://constituteproject.org/constitution/United\\_States\\_of\\_America\\_1992?lang=en](https://constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992?lang=en). 28 April 2020 Pukul 02: 13 WIB.

Anonim, *Tata Tertib, rdpr8\_2014\_1.pdf*. [http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan\\_dpr/pe\\_rdpr8\\_2014\\_1.pdf](http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/pe_rdpr8_2014_1.pdf). 28 April 2020 Pukul 04: 25 WIB.

*Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja*, <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja>. 30 April 2020 Pukul 16:01 WIB.

*Official 2016 Presidential General Election Results*, <https://transition.fec.gov/pubrec/fe2016/2016presgeresults.pdf>, diakses pada 7 Mei 2020 Pukul 10:01 WIB.

Admin, *Regulasi Untuk (Warga) Desa*, <https://www.ireyogyo.org/regulasi-untuk-warga-desa/>. 8 Mei 2020 Pukul 18:27 WIB.

*Buku Panduan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2018*, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2018/08/Buku-Panduan-Akademik-Program-Sarjana-Fakultas-Hukum-Tahun-2018.pdf>. 30 April 2020 Pukul 15:32 WIB

Anonim, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>. 7 Mei 2020 Pukul 17:03 WIB.

Anonim, *Data Peraturan*, [http://peraturan.go.id/peraturan/index-lembarannegara.html?LembaranNegaraSearch%5Bjenis\\_peraturan\\_id%5D=11e449f35c25e4d0b18e313231373039&LembaranNegaraSearch%5Bnomor%5D=1&LembaranNegaraSearch%5Btahun%5D=2015&LembaranNegaraSearch%5Btentang%5D=..](http://peraturan.go.id/peraturan/index-lembarannegara.html?LembaranNegaraSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=11e449f35c25e4d0b18e313231373039&LembaranNegaraSearch%5Bnomor%5D=1&LembaranNegaraSearch%5Btahun%5D=2015&LembaranNegaraSearch%5Btentang%5D=..), 7 Mei 2020 Pukul 17:16 WIB.

Ahmad Yani (SAY n' Partners Lawfirm), Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018, h. 119 - 135

# BAB 10

## PERTEMUAN KESEPULUH SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG- UNDANG DASAR 1945

### A. Pendahuluan

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip "checks and balances", ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, teori dan praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil, namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Dengan demikian, ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani (SAY n' Partners Lawfirm), Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018, h. 119

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Jakarta: Graffiti Press, 1995.
- David Marsh Dan Gerry Stoker, Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik (Terj.), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Deliar Noer, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Bandung : Mizan, 1998.
- Hadjı Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, Cet Ke-2, Jakarta: Siguntang, 1971.
- Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara Baru, cet vi, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002; Buku I Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia, 2005
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni 1992.
- Sri Soemantri Martosoewignyo, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang

Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Dikutip dalam Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Bambang Wijojanto, “Reformasi Konstitusi: Sebuah Keniscayaan” Detak, No. 014 Tahun ke-1, 13–19 Oktober 1998.

## **Media**

Amandemen UUD 1945 Dan Permasalahan, Penerbitan PMB-LIPI No. 15 Tahun 1999.

Konstitusi Perlu Direformasi, Suara Karya, tanggal 16 Juni 1998.

Sri Soemantri: “UUD 1945 Memang Belum Sempurna”, Kompas, 20 Oktober 1998.

“Perlu Pendekatan Baru dalam Pemikiran Konstitusi Kenegaraan”, Republika, tanggal 15 Oktober 1998.

“UUD 1945 Hanya Bisa Diubah dengan Amandemen”, Detak, No. 014 Tahun ke- 1, 13–19 Oktober 1998.

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

### **Jurnal/Makalah/Artikel:**

Ahmad Yani (SAY n' Partners Lawfirm), Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018, h. 119 – 135

Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Dikutip dalam Sunarto, Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Bambang Wijojanto, *Refmai Konstitusi: Sebuah Kenicaan Detak*, No. 014 Tahun ke-1, 13 19 Oktober 1998.

CF. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Bandung: Nusa Media, 2008. Dikutip dalam Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 4 dikutip di M. Yasin al-arif "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.2 Vol.22 April 2015.

Sofyan Hadi, Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat), *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Vol. 9, No. 18, Februari 2013.

Sunarto,"Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Zulkarnain Ridwan, "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan DPR terhadap Pemerintah" *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 2, Juni 2015

### **Internet:**

Masnur Marzuki, "Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances dalam UUD 1945", 25 Desember 2011. Makalah pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonsitituksi Untuk Guru SMP di Kota Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2010. ([http://masnurmarzuki.blogspot.co.id/2011/12/pemisahan- kekuasaan- dan prinsip-checks.html](http://masnurmarzuki.blogspot.co.id/2011/12/pemisahan-kekuasaan- dan prinsip-checks.html)), diunduh kembali pada 11 Februari 2024, pukul 09.05 WIB.

# BAB 11

## PERTEMUAN KESEBELAS ILMU PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

### A. Ilmu Pemerintah

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan<sup>41</sup>.

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (*publik policy*). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki

---

<sup>41</sup> Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA, Supriyatno, S.H., MH dan team BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah menggunakan metode penelitian hukum 2011, h. 1 -3

# BAB

# 12

## PERTEMUAN KE DUA BELAS KOMPARASI PENERAPAN MODEL SISTEM PEMERINTAHAN

### A. Sistem Pemerintahan Indonesia

#### 1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
- b. Sistem Konstitusional.
- c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Almond, Gabriel dan S. Coleman, James (Ed.), 1960, *The Politics of Developing Areas*. New Jersey: Princeton University Press.
- A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: FH UI, 1990.
- A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: FH UI, 2009.
- A.V. Dicey. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 1897.
- Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Jakarta: Graffiti Press, 1995.
- Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Dikutip dalam Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2, April 2016.
- Amirin, Tatang S. 2001. Pokok-pokok Teori Sistem. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arend Lijphart. *Parliamentary Government and Presidential Government*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Arend Lijphart. *Pattern of Democracy*. Yale: Yale University Press, 1999.
- Bagir Manan. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Bambang Wijojanto, “Reformasi Konstitusi: Sebuah Keniscayaan” Detak, No. 014 Tahun ke-1, 13–19 Oktober 1998.
- Blondel, Jean, 2015, *The Presidential Republic*, Palgrave Macmillan, New York. Budiardjo, Miriam, Cheibub, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: P.T.Gramedia Pustaka Utama.

- Budiardjo, Miriam.1993. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, John W. 1993. Research Design: Qualitative & Quantitative Approach, hlm. 120. London: Sage.
- C.F. Strong. *Modern Political Constitution*. New York: Sidgwick & Jackson, 1972.
- Cerar, Miro, "The Relationship Between Law and Politics", *Annual Survey of International & Comparative Law*, Vol.15, Iss:1, (2009).
- David Marsh Dan Gerry Stoker, Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik (Terj.), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Deliar Noer, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Bandung : Mizan, 1998.
- Giovanni Sartori. *Comparative Constitutional Enginerring*. New York: New York University Press, 1997.
- Hadjı Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, Cet Ke-2, Jakarta: Siguntang, 1971.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Maxwell, 1971.
- Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara Baru, cet vi, 1987.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, S.H.. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2007.
- Jose Linz, Juan, "The Perils of Presidentialism", *Journal of Democracy*, Vol.1, No.1, Winter 1990.

Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002; Buku I Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Mertokusumo,Sudikno, 1995, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty.

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FH UI, 1988.

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993. Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Musanef. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Ndraha, Tadziluhu. 2003. *Kybernetology I*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pasek Diantha, I Made, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Modern*. Bandung: C.V. Abardin.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia, 2005

Polyanda, Petrus, "Menelurusi Duduknya Ilmu Pemerintahan", *Jurnal Politikologi*, Vol.3, No.1 (Oktober 2016).

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Sistem Pemerintah Negara, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2016

R. Ball, Allan, 1988, *Modern Politics and Government*, Fourth edition. London: Macmillan Education Ltd.

- Sartori,Giovanni, 1994, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes*. London: MacMillan Press Ltd.
- Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim. *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Solihah, Ratnia dan Djopari J.R.G. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni 1992.
- Sri Soemantri Martosowignyo, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang
- Sri Sumantri. *Ketatanegaraan Dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sri Sumantri. Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN. Bandung: Transito, 1976.
- Surbakti, Ramlan. 1990. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Syafiiie, Inu Kencana. 1994. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.
- 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.
- Wheare, K.C., 1962, *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press.
- Wijono Prodjodikoro. *Azaz-azaz Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1977.

## **Jurnal/Makalah/Artikel:**

Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2006. Dikutip dalam Sunarto, Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Ahmad Yani (SAY n' Partners Lawfirm), Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal JIKH* Vol. 12 No. 2 Juli 2018, h. 119 – 135

Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, Ilmu Pemerintahan Sebagai Sumber dan Substansi Hukum Tata Negara, *Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Governabilitas*: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020, ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169, h. 25-38

Bambang Wijojanto, *Refmai Konstitusi: sebuah Kenicayaan Detak*, No. 014 Tahun ke-1, 13 19 Oktober 1998.

CF. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Bandung: Nusa Media, 2008. Dikutip dalam Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 4 dikutip di M. Yasin al-arif "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* No.2 Vol.22 April 2015.

Sofyan Hadi, Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat), *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Vol. 9, No. 18, Februari 2013.

Sunarto,"Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016.

Zulkarnain Ridwan, "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan DPR terhadap Pemerintah" Jurnal Konstitusi, Volume 12, No. 2, Juni 2015

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun II (Tahun 1946) No.7.) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11 sampai dengan Nomor 14) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656).

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyaratatan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **Media**

Amandemen UUD 1945 Dan Permasalahan, Penerbitan PMB-LIPI No. 15 Tahun 1999.

Konstitusi Perlu Direformasi, Suara Karya, tanggal 16 Juni 1998.

Sri Soemantri: "UUD 1945 Memang Belum Sempurna", Kompas, 20 Oktober 1998.

"Perlu Pendekatan Baru dalam Pemikiran Konstitusi Kenegaraan", Republika, tanggal 15 Oktober 1998.

"UUD 1945 Hanya Bisa Diubah dengan Amandemen", Detak, No. 014 Tahun ke- 1, 13-19 Oktober 1998.

## **Internet**

Admin, *Regulasi Untuk Warga Desa*, [https://www.ireyogya.org/regulasi-untuk-warga- desa/](https://www.ireyogya.org/regulasi-untuk-warga-desa/). 8 Mei 2020 Pukul 18:27 WIB.

Ahmad Yani (SAY n' Partners Lawfirm), Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018, h. 119 – 135

Anonim, *Data Peraturan*, [http://peraturan.go.id/peraturan/index-lembarannegara.html?LembaranNegaraSearch%5Bjenis\\_peraturan\\_id%5D=11e449f35c25e4d0b18e313231373039&LembaranNegaraSearch%5](http://peraturan.go.id/peraturan/index-lembarannegara.html?LembaranNegaraSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=11e449f35c25e4d0b18e313231373039&LembaranNegaraSearch%5)

Bnomor%5D=1& LembaranNegaraSearch%5Btahun%5D=2015&LembaranNe garaSearch%5Btentangan%5D=. 7 Mei 2020 Pukul 17:16 WIB.

Anonim, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>. 7 Mei 2020 Pukul 17:03 WIB.

Anonim, *Tata Tertib*, [http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan\\_dpr/pe rdpr8\\_2014\\_1.pdf](http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/pe rdpr8_2014_1.pdf). 28 April 2020 Pukul 04: 25 WIB.

Article II Section 1 dan the 12<sup>th</sup> Amendment of *the Constitution of the United States of America*, [https://constituteproject.org/constitution/United\\_States\\_of\\_America\\_1992?lang=en](https://constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992?lang=en). 28 April 2020 Pukul 02: 13 WIB.

*Buku Panduan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2018*, <http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2018/08/Buku-Panduan-Akademik-Program-Sarjana-Fakultas-Hukum-Tahun-2018.pdf>. 30 April 2020 Pukul 15:32 WIB

Masnur Marzuki, "Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances dalam UUD 1945", 25 Desember 2011. Makalah pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk Guru SMP di Kota Yogyakarta, tanggal 18 Desember 2010. (<http://masnurmazuki.blogspot.co.id/2011/12/pemisahan-kekuasaan- dan prinsip-checks.html>), diunduh kembali pada 11 Februari 2024, pukul 09.05 WIB.

*Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja*, <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja>. 30 April 2020 Pukul 16:01 WIB.

*Official 2016 Presidential General Election Results*, <https://transition.fec.gov/pubrec/fe2016/2016presgeresults.pdf>, diakses pada 7 Mei 2020 Pukul 10:01 WIB.

Pengertian Konsep”, (<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2035426-pengertian-konsep/#ixzz1J8Ld6mh5>).  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Teori>.

## TENTANG PENULIS



### A. Junaedi Karso

Lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah

Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar, (Jurnal MODERAT, 2019); Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar, (Journal of Government and Civil Society, 2019); Peran Humas dalam Menyebarluaskan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty, (International Jurnal of

Social Science Humanities Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanities Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Sociel Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterpreses, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service,

(Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa>, 2021).

Sedangkan Buku-buku yang telah di tulis antara lain: Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Membangun Kualitas pelayanan Administrasi Pertanahan; Perkawinan Campuran & Kesejahteraan; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu; Pengaruh Kepemimpinan, Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga negara di dalam pembangunan perekonomian, soal, budaya di Kabupaten Indramayu; Pengaruh Implementasi, Manajemen Pemerintahan, Terhadap Kinerja, Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Dasyatnya oney Politik Pilkades (Pilwu) di Indramayu; Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan, penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia yang Tangguh; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid-19; Peranan dan Upaya-Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan, Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 4.0; Pembangunan Transportasi Tol Laut dalam Mewujudkan Indonesia yang Makmur Menuju Poros Maritim Dunia; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi & Ekonomi Masyarakat; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Urgensi Kepemilikan Hak

Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Ketegasan Polri & Penegakan Hukum Dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Fredy Sambo Dalam Kasus Pembunuhan Nopryansah Yoshua Hutabarat, Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia Versus Peran Dan Fungsi Kementerian Perdagangan RI Dalam Menanggulangi Tingginya Dan Langkanya Di Pasaran, (Membeli Minyak Goreng Via Kartu Tanda Penduduk), Seputar Linatas Kejahatan Realita Antara & Kamuplase Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Siapa Diuntung Dan Siapa Yang Buntung Penundaan Pelaksanaan Pemilu 2024 Untuk Kepentingan Rakyat Atau Cukong Dan Merupakan Pemakzulan Konsitusi, Demokrasi Di Indonesia; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu 2024 Meraung Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; dan Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024.

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermedite One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermedite Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awarness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020,

Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "How to Perform While Transform" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaan Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative Research (CIQnR) di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021, Certified International Qualitative Research (CIQaR) di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu

tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email [Bintang.lyatiara66@gmail.com](mailto:Bintang.lyatiara66@gmail.com), juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan

: EC00202419339, 28 Februari 2024

**Pencipta**

Nama : A. Junadi Karso

Alamat

Jl. Kebon Randu I, RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat, 45256

Kewarganegaraan

: Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : A. Junadi Karso

Alamat

Jl. Kebon Randu I, RT.005/RW.001, Desa Anjatan Baru, Anjatan, Indramayu, Jawa Barat 45256

Kewarganegaraan

: Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: Buku Ajar Pemerintah Nasional

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Jangka waktu perlindungan

: 000594700

Nomor pencatatan

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto

NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.